

ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA DALAM TATA KELOLA E-GOVERNMENT

Isak Samuel Kijne Mansawan^{1*}, Hengky Saiba²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Manokwari, Indonesia
kijne07@gmail.com^{1*}, hengkisaiba52@gmail.com²



Diterima: 29 Mei 2025 – Diperbaiki: 21 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

Analyzing national policy in e-government governance is crucial given the rapid development of digital technology, which demands efficiency and transparency in government. The transformation towards e-government aims to improve public services, civic participation, and government accountability through the utilization of information technology. However, its implementation often faces challenges such as infrastructure gaps, human resource capacity, and regulatory harmonization. This journal aims to analyze national policy in e-government governance from a governmental perspective, focusing on policy effectiveness, system integration, and its impact on administrative performance. This research employs a qualitative approach through literature review and analysis of policy documents from various countries, including Indonesia, as well as interviews with relevant stakeholders. Data was collected from official government sources, international reports, and academic journals to ensure the validity of the findings. The research results indicate that the success of e-government governance largely depends on political commitment, the availability of technological infrastructure, and the training of civil servants. Countries with integrated and adaptive policies tend to achieve higher efficiency in public services compared to those that adopt a partial approach. In Indonesia, despite significant progress in government digitalization, challenges such as disparity in internet access and inter-agency coordination remain major obstacles. This journal concludes that strengthening regulations, investing in infrastructure, and improving digital literacy are strategic steps to optimize e-government governance. The recommendations provided include the formulation of an inclusive and sustainable national framework to support the digital transformation of government.

Keywords: E-Government, Governance, State Policy, Digital Government, Technological Transformation

✉ Alamat korespondensi:

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Manokwari, Indonesia
kijne07@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pemerintahan menuju tata kelola berbasis digital atau e-government. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, implementasi e-government menjadi prioritas strategis untuk mendukung reformasi birokrasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa transformasi ini sering terhambat oleh tantangan seperti infrastruktur yang tidak merata, rendahnya literasi digital, dan inkonsistensi kebijakan antarinstansi. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh *United Nations* melalui *E-Government Development Index* (EGDI), menyoroti bahwa negara-negara berkembang cenderung tertinggal dalam integrasi sistem digital dibandingkan negara maju. Penelitian lain, misalnya oleh Heeks (2006), mengusulkan pendekatan berbasis kapasitas lokal untuk mengatasi hambatan tersebut, sementara Moon (2002) menekankan pentingnya kerangka regulasi yang kuat. Meski demikian, penelitian-penelitian ini masih terbatas pada analisis umum tanpa menawarkan solusi kontekstual yang spesifik untuk negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam harmonisasi kebijakan dan peningkatan kinerja administratif.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan negara dalam tata kelola e-government dari aspek pemerintahan, dengan fokus pada efektivitas implementasi dan strategi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur sebelumnya dengan menyediakan wawasan yang lebih spesifik dan aplikatif. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif kebijakan lintas negara dengan konteks lokal Indonesia, yang dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya. Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi isu krusial dalam transformasi digital pemerintahan dan kontribusinya terhadap penguatan sistem administrasi publik yang inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika tata kelola e-government. Untuk mengarahkan penelitian ini, pertanyaan masalah dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan negara dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola e-government, dan faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan implementasinya di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan negara dalam tata kelola e-government dari aspek pemerintahan. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: analisis dokumen kebijakan resmi pemerintah, studi literatur dari sumber akademik dan laporan internasional, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah dan pakar teknologi informasi (Creswell, 2013). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap efektivitas implementasi e-government dan hambatan yang dihadapi, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis lintas negara dengan fokus kontekstual pada harmonisasi kebijakan dan peningkatan kinerja administratif, yang memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi adaptif untuk transformasi digital pemerintahan (OECD, 2021). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum atau normatif, studi ini menawarkan pendekatan spesifik dengan memetakan dinamika lokal dan global dalam satu kerangka analisis. Proses analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan, di mana hasil wawancara diverifikasi dengan dokumen kebijakan dan literatur terkait. Pendekatan ini memberikan gambaran jelas kepada pembaca tentang bagaimana kebijakan e-government dirancang, diterapkan, dan dievaluasi dalam praktik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan E-Government di Indonesia

1. Evolusi Kebijakan E-Government: Dari Inpres No. 3/2003 hingga Perpres Terbaru

Pengembangan e-government di Indonesia dimulai secara formal dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres ini menjadi tonggak awal yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik

dan efisiensi administrasi. Kebijakan ini menetapkan empat tahapan pengembangan e-government: persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan, yang mencakup pembuatan situs informasi hingga integrasi aplikasi G2G, G2B, dan G2C (DISKOMINFO, 2022). Seiring waktu, kebijakan ini berkembang melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memperkuat kerangka tata kelola digital dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Perpres ini menandai evolusi dari pendekatan sektoral menuju ekosistem yang terpadu, didukung oleh Peraturan Menteri PAN-RB No. 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Perkembangan ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tuntutan globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat.

2. Analisis Kesesuaian Kebijakan dengan Tantangan Kontemporer

Kebijakan e-government di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, seperti peningkatan indeks EGDI (*E-Government Development Index*) versi United Nations. Namun, tantangan kontemporer seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, dan keamanan data masih menjadi hambatan signifikan (BPS, 2023). Inpres No. 3/2003 dirancang pada era awal internet dengan fokus pada infrastruktur dasar, sementara Perpres No. 95/2018 berupaya menjawab isu modern seperti interoperabilitas sistem dan perlindungan data pribadi (OECD, 2021). Meski demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya selaras dengan realitas kontemporer, terutama di daerah terpencil yang kekurangan infrastruktur TIK (Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2024). Analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlu lebih adaptif terhadap tantangan seperti ancaman siber dan kebutuhan akan inklusivitas digital agar dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat (Weerakkody et al., 2011).

3. Pemetaan Stakeholder dan Tanggung Jawab dalam Ekosistem E-Government

Ekosistem e-government melibatkan berbagai stakeholder dengan peran yang saling berkaitan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian PAN-RB, bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pengawasan SPBE. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem sesuai kondisi lokal, meskipun sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya (Universitas Airlangga, 2023). Sektor swasta berperan sebagai penyedia teknologi dan inovasi, sementara masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi penentu keberhasilan layanan (Indrajit, 2007). Lembaga internasional, seperti UNDP, juga berkontribusi melalui bantuan teknis dan pendanaan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa koordinasi antar-stakeholder menjadi kunci, dengan Kominfo sebagai koordinator utama dalam memastikan integrasi dan harmonisasi sistem (Kemsetneg, 2018). Tanggung jawab yang jelas dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membangun ekosistem e-government yang berkelanjutan.

B. Komparasi Kebijakan E-Government Antar negara

1. Model Kebijakan E-Government di Negara Maju (Estonia, Korea Selatan, Singapura)

Negara-negara maju seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura telah menjadi benchmark global dalam tata kelola e-government. Estonia dikenal dengan model "digital society" melalui program e-Estonia, yang mengintegrasikan 99% layanan publik secara daring dengan sistem *X-Road*, sebuah platform interoperabilitas data yang aman. Kebijakan ini didukung oleh identitas digital warga (e-ID) yang wajib, memungkinkan akses cepat ke layanan seperti pemungutan suara elektronik (*e-voting*) sejak 2005 (Vassil, 2015). Korea Selatan, melalui strategi "Government 3.0," fokus pada personalisasi layanan dan transparansi dengan memanfaatkan *big data* dan kecerdasan buatan, seperti pada portal KONEPS untuk pengadaan publik (Kim, 2016). Singapura mengadopsi pendekatan "Smart Nation," yang mengintegrasikan teknologi IoT dan aplikasi seperti SingPass untuk autentikasi digital terpusat. Ketiga negara ini memiliki kesamaan dalam investasi besar pada infrastruktur TIK, regulasi yang mendukung inovasi, dan literasi digital masyarakat yang tinggi, menjadikan e-government sebagai tulang punggung administrasi publik.

2. Pendekatan Kebijakan di Negara Berkembang (Malaysia, Thailand, Vietnam)

Di negara berkembang seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, pendekatan e-government lebih berfokus pada adaptasi bertahap sesuai kapasitas nasional. Malaysia

meluncurkan *Multimedia Super Corridor* (MSC) pada 1996 dan kemudian MyGovUC, sebuah platform terpadu untuk layanan G2G dan G2C, yang menunjukkan komitmen pada digitalisasi meskipun tantangan infrastruktur pedesaan masih ada. Thailand mengembangkan "Thailand 4.0" dengan aplikasi seperti *Government Smart Service* (GSS), namun implementasinya terhambat oleh birokrasi dan kesenjangan digital antarwilayah. Vietnam, melalui Resolusi 36a/NQ-CP tahun 2015, berupaya mempercepat e-government dengan portal layanan publik daring, tetapi masih bergulat dengan rendahnya anggaran TIK dan keamanan data. Ketiga negara ini menunjukkan kemajuan, namun pendekatannya lebih pragmatis, sering kali bergantung pada bantuan internasional dan kolaborasi swasta (OECD, 2020). Fokus utama adalah efisiensi birokrasi, meskipun belum mencapai integrasi penuh seperti negara maju (World Bank, 2022).

3. Analisis Kesenjangan dan Pelajaran untuk Indonesia

Analisis kesenjangan antara negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur, koordinasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Estonia, Korea Selatan, dan Singapura memiliki indeks EGDI di atas 0,9 (UN *E-Government Survey* 2022), sementara Indonesia hanya mencapai 0,67, lebih rendah dibandingkan Malaysia (0,75) dan Thailand (0,72). Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh disparitas akses internet hanya 66% populasi Indonesia terhubung pada 2023 dibandingkan 95% di Singapura serta rendahnya literasi digital. Pelajaran untuk Indonesia meliputi pentingnya investasi infrastruktur seperti yang dilakukan Estonia, adopsi platform terpusat ala Korea Selatan, dan pelibatan swasta seperti di Malaysia (UN DESA, 2022). Selain itu, harmonisasi regulasi dan pelatihan ASN, sebagaimana diterapkan Singapura, dapat mempercepat SPBE di Indonesia. Dengan menyesuaikan strategi ini pada konteks lokal, Indonesia dapat mengatasi tantangan geografis dan sosial-ekonomi untuk memperkuat tata kelola digital.

C. Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia

1. Hambatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Digital

Implementasi e-government di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Meskipun terjadi peningkatan penetrasi internet, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan hanya 66,48% populasi yang memiliki akses internet, dengan kesenjangan besar antara wilayah urban (80%) dan rural (52%). Proyek Palapa Ring, yang bertujuan menyediakan konektivitas nasional, belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku (Kominfo, 2022). Selain itu, kualitas jaringan sering kali tidak memadai untuk mendukung aplikasi e-government yang kompleks, seperti layanan SPBE (Pratama, 2021). Hambatan ini memperparah aksesibilitas digital, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga mengurangi efektivitas transformasi digital pemerintahan (World Bank, 2021).

2. Kesenjangan Kapasitas SDM dan Literasi Digital

Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital menjadi penghambat utama lainnya. Banyak aparatur sipil negara (ASN) belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengelola sistem e-government, dengan hanya 35% yang dilatih secara intensif dalam penggunaan TIK pada 2022 (PAN-RB, 2022). Di sisi masyarakat, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa literasi digital nasional hanya mencapai indeks 3,54 dari 5 pada 2023, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia (4,2). Kesenjangan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran akan manfaat e-government, terutama di kalangan masyarakat pedesaan (Susanti, 2022). Tanpa peningkatan kapasitas SDM dan edukasi publik, adopsi teknologi digital akan tetap terbatas (OECD, 2020).

3. Fragmentasi Kebijakan Antarinstansi dan Tingkat Pemerintahan

Fragmentasi kebijakan antarinstansi dan tingkat pemerintahan menjadi salah satu tantangan struktural dalam tata kelola e-government. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres No. 95/2018 menghadapi kendala koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Misalnya, Kementerian Kominfo fokus pada

infrastruktur, sementara Kementerian PAN-RB menangani reformasi birokrasi, namun sering kali terjadi tumpang tindih atau kurangnya sinergi (KPK, 2021). Di tingkat daerah, banyak pemerintah kabupaten/kota mengembangkan aplikasi sendiri tanpa integrasi dengan sistem nasional, menciptakan "data silos" yang menghambat interoperabilitas (Nugroho, 2023). Studi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan bahwa 60% instansi belum sepenuhnya mematuhi standar SPBE. Fragmentasi ini melemahkan efisiensi dan konsistensi layanan digital.

4. Isu Keamanan Data dan Privasi dalam Tata Kelola Digital

Keamanan data dan privasi menjadi isu kritis seiring meningkatnya digitalisasi pemerintahan. Kasus kebocoran data, seperti yang dialami BPJS Kesehatan pada 2021 yang memengaruhi 279 juta penduduk, menunjukkan kerentanan sistem e-government Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Hingga 2023, regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27/2022 belum sepenuhnya diimplementasikan, meninggalkan celah dalam perlindungan data warga. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan peningkatan serangan siber terhadap instansi pemerintah sebesar 25% pada 2022, dengan mayoritas disebabkan oleh lemahnya protokol keamanan. Tanpa investasi pada *cybersecurity* dan kesadaran privasi, kepercayaan publik terhadap e-government akan terus tergerus (Transparency International, 2021).

D. Efektivitas Kebijakan E-Government dalam Pelayanan Publik

1. Analisis Dampak Terhadap Efisiensi Layanan Administratif

Kebijakan e-government di Indonesia, yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah membawa perubahan besar dalam efisiensi layanan administratif di berbagai sektor pemerintahan. Salah satu contoh nyata adalah pengenalan *Online Single Submission* (OSS), sebuah platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan pengurusan izin usaha. Sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan karena melibatkan banyak tahapan birokrasi dan kunjungan fisik ke kantor pemerintahan. Kini, dengan OSS, pelaku usaha dapat menyelesaikan proses tersebut dalam hitungan hari, bahkan jam, tergantung pada jenis izinnya (Kementerian Investasi/BKPM, 2022). Laporan Kementerian PAN-RB pada 2022 mencatat bahwa 70% instansi pemerintah pusat telah mengintegrasikan layanan mereka ke dalam ekosistem SPBE, menghasilkan penghematan biaya operasional sebesar 15% dan memangkas waktu pelayanan hingga 40% di beberapa sektor. Efisiensi ini juga terlihat dalam pengelolaan administrasi internal pemerintah, seperti pelaporan kinerja ASN yang kini dilakukan melalui aplikasi daring, mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses evaluasi. Namun, dampak positif ini belum merata. Di wilayah urban seperti Jakarta dan Surabaya, manfaatnya terasa jelas berkat infrastruktur TIK yang memadai. Sebaliknya, di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua, keterbatasan akses internet dan listrik masih menghambat penerapan sistem ini secara optimal. Selain itu, digitalisasi telah mengurangi interaksi tatap muka antara petugas dan masyarakat, yang secara tidak langsung meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik suap. Meskipun demikian, keberhasilan penuh masih bergantung pada penyediaan infrastruktur yang inklusif dan pelatihan bagi pengguna sistem, baik ASN maupun masyarakat umum.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Kebijakan Anti-Korupsi Berbasis Digital

Penerapan e-government juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya sebagai bagian dari kebijakan anti-korupsi berbasis digital. Platform seperti *e-Planning* dan *e-Budgeting*, yang diwajibkan dalam kerangka SPBE, memberikan akses publik terhadap informasi perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah secara real-time. Masyarakat kini dapat melihat secara langsung bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan, yang sebelumnya sering tersembunyi dalam dokumen manual yang sulit diakses (OGI, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-Procurement* telah memangkas praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi sebesar 20% sejak pertama kali diperluas pada 2019. Sistem ini memungkinkan proses tender dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan jejak

digital yang dapat diaudit kapan saja, sehingga mengurangi ruang gerak bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi. Selain itu, inisiatif seperti portal data terbuka (data.go.id) memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Kepatuhan instansi terhadap standar SPBE masih bervariasi, dengan beberapa daerah belum sepenuhnya mengadopsi sistem tersebut karena keterbatasan teknis atau resistensi internal. Di sisi lain, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat terutama di luar kota besar membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan informasi yang tersedia untuk pengawasan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital, meskipun merupakan alat yang kuat, tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh edukasi publik dan komitmen institusional yang konsisten.

3. Studi Kasus Penerapan E-Government di Tingkat Daerah (*Pilot Projects*)

Studi kasus penerapan e-government di tingkat daerah memberikan gambaran nyata tentang potensi dan tantangan kebijakan ini dalam konteks Indonesia yang beragam. Di Kota Surabaya, misalnya, aplikasi e-Musrenbang telah menjadi model sukses dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Melalui platform ini, warga dapat mengusulkan program secara daring, melacak status usulan mereka, dan menerima pembaruan langsung, yang pada 2022 meningkatkan tingkat kepuasan publik hingga 85% berdasarkan survei internal pemerintah kota. Keberhasilan ini didukung oleh infrastruktur TIK yang kuat, kesadaran digital masyarakat yang tinggi, dan komitmen pemimpin lokal untuk mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola. Sebaliknya, di Kabupaten Jayapura, Papua, penerapan layanan digital menghadapi hambatan serius. Data dari Dinas Kominfo setempat menunjukkan bahwa pada 2023, hanya 30% desa di wilayah ini yang memiliki akses internet stabil, sehingga layanan seperti pendaftaran kependudukan daring atau pembayaran pajak elektronik sulit dijalankan. Proyek percontohan di Jayapura juga terkendala oleh minimnya pelatihan bagi ASN dan rendahnya literasi digital warga, yang menyebabkan tingkat adopsi teknologi tetap rendah. Perbandingan kedua kasus ini menyoroti bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada kesiapan lokal, baik dari segi infrastruktur fisik, kapasitas SDM, maupun dukungan politik. Pilot projects seperti ini menjadi cermin bagi kebijakan nasional, menunjukkan bahwa pendekatan seragam tidak cukup efektif di negara dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang heterogen seperti Indonesia. Oleh karena itu, strategi adaptasi lokal perlu dikembangkan untuk memastikan manfaat e-government dapat dirasakan secara menyeluruh.

E. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi E-Government

1. Kepemimpinan Politik dan Komitmen Pemerintah

Kepemimpinan politik dan komitmen pemerintah merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi e-government. Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan mendapat dorongan kuat melalui Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, yang mencerminkan visi nasional untuk modernisasi birokrasi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah. Pemimpin yang memiliki visi teknologi, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendorong aplikasi "SAPAWARGA" untuk pelayanan publik, menunjukkan bagaimana komitmen politik lokal dapat mempercepat adopsi e-government. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dan prioritas dari elit politik sering kali menghambat harmonisasi antarinstitusi, seperti yang terlihat dalam lambatnya integrasi sistem di beberapa kementerian. Studi global, seperti yang dilakukan oleh OECD, menegaskan bahwa negara-negara dengan kepemimpinan yang kuat misalnya Estonia dengan e-Estonia mampu mencapai tingkat digitalisasi yang tinggi karena adanya dukungan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepemimpinan yang proaktif dan komitmen lintas sektor menjadi landasan untuk mengatasi resistensi birokrasi dan memastikan implementasi yang efektif.

2. Ketersediaan Sumber Daya dan Anggaran

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran merupakan elemen krusial dalam mendukung e-government. Di Indonesia, anggaran untuk teknologi informasi dalam

APBN masih terbatas, dengan alokasi TIK pada 2023 hanya mencapai 0,8% dari total belanja negara, jauh di bawah Singapura yang mengalokasikan 3-4%. Keterbatasan ini memengaruhi pembangunan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang masih bergantung pada proyek seperti Palapa Ring. Dari sisi SDM, hanya 35% ASN yang menerima pelatihan intensif tentang penggunaan teknologi SPBE pada 2022, menunjukkan kesenjangan kapasitas yang signifikan. Negara-negara sukses seperti Korea Selatan menginvestasikan miliaran dolar untuk infrastruktur dan pelatihan, yang memungkinkan integrasi layanan seperti KONEPS menjadi efisien (Kim, 2016). Tanpa sumber daya yang memadai baik dalam bentuk pendanaan maupun tenaga terampil implementasi e-government di Indonesia akan terus menghadapi kendala dalam skala dan kualitas layanan.

3. Partisipasi Publik dan Umpan Balik Pengguna

Partisipasi publik dan umpan balik pengguna memainkan peran penting dalam memastikan e-government relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, aplikasi seperti "Lapor!" memungkinkan warga melaporkan masalah pelayanan publik secara langsung, dengan lebih dari 1,2 juta aduan diterima sejak 2011 hingga 2023 (KSP & KemenPAN-RB, 2023). Keberhasilan aplikasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki sistem secara bertahap. Namun, tingkat partisipasi masih rendah di luar kota besar karena literasi digital yang terbatas indeks nasional hanya 3,54 dari 5 pada 2023 (APJII, 2023). Sebagai perbandingan, Singapura dengan "Smart Nation" melibatkan warga melalui konsultasi publik dan survei berkala, memastikan layanan seperti *SingPass* terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Umpan balik yang efektif membutuhkan edukasi publik yang lebih luas dan desain antarmuka yang ramah pengguna, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat pedesaan. Tanpa partisipasi aktif, e-government berisiko menjadi proyek elitis yang gagal memenuhi harapan masyarakat luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan negara dalam tata kelola e-government dari aspek pemerintahan yang telah dibahas, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi e-government di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan kebijakan sejak Inpres No. 3/2003 hingga Perpres No. 95/2018 mencerminkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun, kesesuaian kebijakan dengan tantangan kontemporer seperti kesenjangan infrastruktur, literasi digital, dan keamanan data belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah terpencil. Pemetaan stakeholder menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan, dengan Kominfo dan Kementerian PAN-RB sebagai motor utama.

Komparasi dengan negara maju seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura, serta negara berkembang seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, menunjukkan bahwa keberhasilan e-government bergantung pada investasi infrastruktur, regulasi yang kuat, dan partisipasi masyarakat area di mana Indonesia masih tertinggal. Tantangan implementasi, termasuk hambatan infrastruktur, kesenjangan SDM, fragmentasi kebijakan, dan isu keamanan data, menjadi penghalang utama yang memperlambat transformasi digital. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan e-government terlihat dalam peningkatan efisiensi layanan administratif (contohnya OSS), transparansi melalui e-Procurement, dan keberhasilan proyek percontohan seperti e-Musrenbang di Surabaya, meskipun hasilnya bervariasi di daerah lain seperti Jayapura. Faktor penentu keberhasilan, seperti kepemimpinan politik, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi publik, menjadi kunci untuk mengoptimalkan tata kelola digital di Indonesia.

Penelitian ini menjawab pertanyaan masalah bahwa kebijakan negara dapat dioptimalkan melalui harmonisasi regulasi, investasi infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM serta literasi digital, dengan faktor kepemimpinan dan partisipasi publik sebagai pendorong utama. Kebaruan studi ini, yang mengintegrasikan perspektif lintas negara dengan konteks lokal, memberikan kontribusi ilmiah berupa strategi adaptif yang relevan bagi negara berkembang. Signifikansi penelitian ini terletak pada penguatan sistem administrasi publik yang inklusif, yang dapat menjadi model bagi transformasi digital pemerintahan di masa depan.

REFERENSI

- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2023). Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023. apjii.or.id.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. bps.go.id.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2022). Laporan Ancaman Siber 2022. bssn.go.id.
- CNN Indonesia. (20 Mei 2021). Kebocoran Data BPJS Kesehatan 2021. cnnindonesia.com.
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. SAGE Publications.
- Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura. (2023). Evaluasi Akses Digital 2023. jayapura.go.id.
- DISKOMINFO Kota Bogor. (2022). Tahapan E-Government. kominfo.kotabogor.go.id.
- e-Estonia Initiative. X-Road: The Backbone of Digital Estonia. <https://e-estonia.com/solutions>.
- Government of Vietnam. (2015). Resolution 36a/NQ-CP on E-Government.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment*. SAGE Publications.
- Indrajit, R.E. (2007). *E-Government: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). Laporan Kinerja OSS 2022. bkpm.go.id.
- Kementerian Keuangan. (2023). APBN 2023: Postur Anggaran TIK. kemenkeu.go.id.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Laporan Koordinasi SPBE 2021. kominfo.go.id.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan Progres Palapa Ring. kominfo.go.id.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peran Kominfo dalam E-Government. www.kominfo.go.id.
- Kementerian PAN-RB. (2022). Evaluasi SPBE 2022. menpan.go.id.
- Kementerian PAN-RB. (2022). Laporan Pelatihan ASN 2022. menpan.go.id.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2018). *E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*.
- Kim, S. (2016). Government 3.0 in Korea: Openness and Innovation. *Public Administration Review*.
- Kim, S. (2016). Korea's Digital Government Success. *Public Administration Review*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Evaluasi Tata Kelola SPBE. kpk.go.id.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Pencegahan Korupsi 2019-2022. kpk.go.id.
- KSP (Kantor Staf Presiden) dan KemenPAN-RB. (2023). Laporan Kinerja Laporan! 2023. lapor.go.id.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2022). Studi Kepatuhan SPBE 2022. lan.go.id.
- Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit. (2020). MyGovUC Overview.
- Moon, M.J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities. *Public Administration Review*.
- Nugroho, Y. (2023). Fragmentasi Data dalam E-Government Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- OECD. (2020). Digital Government in Developing Countries.
- OECD. (2020). Digital Government Review: Estonia. oecd.org.
- OECD. (2020). Digital Government Skills Framework.
- OECD. (2021). Digital Government Strategies.
- Open Government Indonesia. (2021). Laporan Transparansi Digital 2021. ogi.go.id.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Laporan Kepuasan Publik e-Musrenbang. surabaya.go.id.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2022). SAPAWARGA: Inovasi Pelayanan Publik. jabarprov.go.id.
- Peraturan Menteri PAN-RB No. 59 Tahun 2020. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pratama, A. (2021). Evaluasi Infrastruktur TIK untuk E-Government. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Singapore Public Service Division. (2021). Digital Transformation Strategy.
- Smart Nation Singapore. Public Engagement in Digital Governance. smartnation.gov.sg.
- Smart Nation Singapore. SingPass: Digital Identity for All. <https://www.smartnation.gov.sg>.
- Susanti, R. (2022). Literasi Digital dan Adopsi E-Government. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Thailand Digital Government Agency. (2021). Thailand 4.0 and GSS. <https://dga.or.th>.
- Transparency International. (2021). Cybersecurity and Public Trust in Digital Governance.
- UN DESA. (2022). E-Government Development Index 2022. <https://publicadministration.un.org>.

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Perlindungan Data Pribadi. dpr.go.id.
- UNDP. (2020). Support for E-Government Development in Indonesia.
- United Nations. (2022). E-Government Survey 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>.
- Universitas Airlangga. (2023). Komparasi E-Government di Lima Daerah pada Saat Pandemi Covid-19.
- Vassil, K. (2015). Estonian E-Government Ecosystem. Tallinn University of Technology.
- Weerakkody et al. (2011). Challenges of E-Government in Developing Countries.
- World Bank. (2021). Indonesia Digital Economy Report.
- World Bank. (2022). Digital Development in Southeast Asia.